

## **SKRIPSI**

# **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK**



Diajukan oleh:

Pascal Andre Rampengan

NIM : 16051029  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Internasional

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
2020**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK  
MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN  
ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Nama</b>          | <b>: Pascal Andre Rampengan</b> |
| <b>NIM</b>           | <b>: 16051029</b>               |
| <b>Program Studi</b> | <b>: Ilmu Hukum</b>             |
| <b>Peminatan</b>     | <b>: Hukum Internasional</b>    |

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 Juli 2020**

**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi,**



**Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H.**

**Dekan,**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

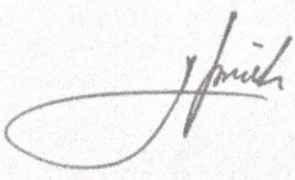
**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**


**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK  
MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN  
ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK**

**Diajukan oleh:**

**Pascal Andre Rampengan  
(16051029)**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 30-07-2020**

**Dosen Pembimbing I**  
  
**Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.**

**Dosen Pembimbing II**  
  
**Dr. Valentino Lumowa**

**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP  
PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK  
MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN  
ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK**

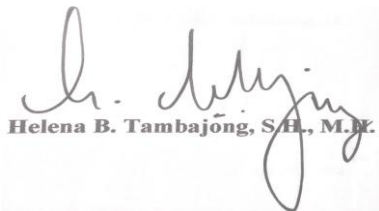
**Nama** : Pascal Andre Rampengan  
**NIM** : 16051029  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Internasional

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik  
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30-07-2020**

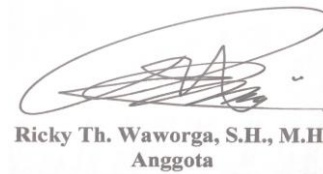
**TIM DOSEN PENGUJI**



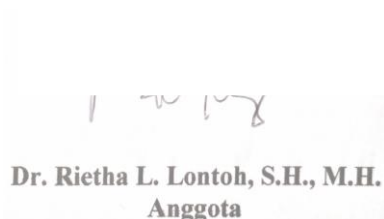
**Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.**  
Ketua



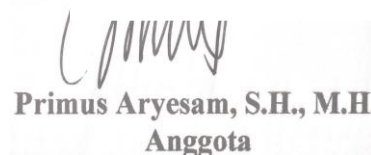
**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**



**Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.**  
Anggota




**Dr. Rietha L. Lontoh, S.H., M.H.**  
Anggota



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**  
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum**

Dekan  
  
**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis yang telah dibuat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan sudah memenuhi standar kepatutan yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan ini, penulis juga menyatakan bahwa hasil karya penulis ini bukan merupakan plagiasi terhadap karya penulis lain. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima konsekuensinya seperti sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,  
  
Pascal Andre Rampengan



## **ABSTRACT**

*Pascal Andre Rampengan, 2020. “THE RESPONSIBILITY OF INDONESIAN GOVERNMENT ON HUMAN TRAFFICKING REVIEWED FROM PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN.” Supervised by Steven Y. Pailah, S.H., M.Si and Dr. Valentino Lumowa.*

*Human trafficking crime has become a prolonged phenomenon. In fact, this crime has caught the attention of various forums and the international communities. In the past, the purpose of human trafficking was to enslave people, so the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights prohibited slavery, which was the reason for human trafficking. Nowadays, this crime has been regarded as an international crime equal to war crimes and crimes against humanity. Responding to the complexity of this crime, the United Nations finally issued its convention on transnational organized crimes. There are three protocols in the convention; one of them is the protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially the women and children. As a country that upholds respect for human rights, Indonesia is actively involved in voicing anti-trafficking narrative. This is marked by ratifying the protocol into the national legal system. However, this policy does not work optimally because Indonesia made a reservation for an article that plays an essential role in resolving the problem of this crime. For this reason, the author believed that it was necessary to study the government's accountability in dealing with this crime as seen from ratifying international legal instruments, legalizing legal rules, institutionalizing related institutions, and then optimizing the law enforcement to prevent this crime from happening. Meanwhile, regarding the relevance of this protocol in helping the government, the author analyzed three related components: ensuring protection for affected victims, providing restitution, and establishing international cooperation to make this effort optimal. This study used a normative juridical method by examining literature materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the research title.*

**Keywords:** *Responsibility, the Government of Indonesia, Human Trafficking.*

## ABSTRAK

Pascal Andre Rampengan, 2020. **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK.”** Dibimbing oleh Steven Y. Pailah, S.H., M.Si dan Dr. Valentino Lumowa.

Fenomena perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang telah dimulai sejak dahulu, bahkan masalah ini telah menjadi fokus berbagai forum dan komunitas internasional. Dulu, tujuan klasik dari perdagangan orang adalah untuk memperbudak orang, sehingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menjelaskan larangan terkait perbudakan yang menjadi alasan orang diperdagangkan. Sementara itu, kini wujud perdagangan orang era modern telah berkembang menjadi kejahatan internasional yang posisinya sejajar dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menjawab kompleksitas masalah perdagangan orang tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya mengeluarkan konvensinya tentang kejahatan transnasional terorganisasi dimana konvensi tersebut diikuti oleh tiga protokol salah satunya adalah Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak. Menjadi negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia terlibat aktif dalam menyuarakan narasi anti perdagangan orang, ditandai dengan meratifikasi protokol tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal karena Indonesia melakukan reservasi terhadap satu pasal yang berperan penting dalam menyelesaikan masalah perdagangan orang. Untuk itu, penulis melihat perlu dikaji bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia terkait mengatasi masalah perdagangan orang yang dapat dilihat dari meratifikasi instrumen hukum internasional, melegalisasi aturan-aturan hukum, menginstitutionalisasi lembaga-lembaga terkait, dan kemudian mengoptimalkan penegakan hukum guna meningkatkan upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan terkait bagaimana relevansi dari protokol tersebut dalam membantu pemerintah menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, penulis menganalisa tiga komponen terkait seperti menjamin perlindungan bagi korban terdampak, memberikan restitusi, hingga menjalin kerja sama internasional dalam rangka memaksimalkan upaya ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan yang terdiri

dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan judul penelitian.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pemerintah Indonesia, Perdagangan orang

## KATA PENGANTAR

Syukur, pujian dan hormat penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala rahmat dan hikmat yang berlimpah yang dianugerahkan, sehingga penulis boleh menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum ini. Skripsi ini dibuat sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis meneliti tentang **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PROTOKOL MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN DAN ANAK-ANAK.**

Selama proses penulisan dan penelitian ini, penulis menyadari adanya tantangan dan kesulitan dalam bentuk keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam penulisan sehingga penelitian hukum ini tidak luput dari kekurangan. Namun, penulis berharap kiranya penelitian ini dapat berdampak positif serta manfaatnya dapat berdaya guna bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Tak lupa juga penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang atas cara dan usahanya sudah membantu baik dalam memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan berkesan. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., semasa hidupnya pernah membaktikan diri di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Steven Pailah, S.H., M.Si., selaku pembimbing I penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Valentino Lumowa, selaku pembimbing II penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ricky Waworga, S.H., M.H., selaku anggota tim penguji pada sidang skripsi;
8. Dr. Rietha Lontoh, S.H., M.H., selaku anggota dari tim penguji pada sidang skripsi;
9. Primus Aryesan, S.H., M.H., selaku anggota tim penguji pada sidang skripsi;
10. Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik penulis.
11. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
12. Mama dan Papa yang tidak pernah berhenti berdoa dan berusaha untuk mendukung penulis dalam menempuh pendidikan;

13. Anggota Keluarga Rampengan-Sewow, kakak dan adik, dan keponakan yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
14. Anggota Keluarga Besar Rampengan-Rumondor, serta Keluarga Besar Sewow yang atas caranya masing-masing selalu hadir dengan semangat dan dukungan bagi penulis;
15. Sahabat penulis di lingkungan kampus dan rumah yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
16. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2016 (M16GTY RECHT) yang berjuang bersama-sama penulis untuk meraih gelar sarjana;
17. Teman-teman OMK Wilayah V St. Michael Paroki Bunda Hati Kudus Yesus Woloan yang selalu memberikan semangat kepada penulis;
18. Pembina dan pengurus Ikatan Nyong Noni De La Salle yang selalu memberikan motivasi;
19. Ikatan Putra Putri Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado yang selalu hadir dengan semangat dan dukungan bagi penulis
20. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 30 Juli 2020

Penulis  
Pascal Andre Rampengan

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>v</b>                            |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB I</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>E. Keaslian Penelitian</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB II</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia</b> ....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Tanggung jawab .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Teori pertanggungjawaban pemerintah .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Pemerintah Indonesia .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Perdagangan orang</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>C. Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan<br/>    Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak.</b> ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Jenis Penelitian</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Sumber Data</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Bahan hukum primer .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 2. Bahan hukum sekunder .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Bahan hukum tersier.....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>C. Metode Pengumpulan Data.....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>D. Metode Analisis Data .....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PEMBAHASAN .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Masalah Perdagangan Orang di Indonesia.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Ratifikasi .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Legalisasi.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Institusionalisasi .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4. Penegakan hukum .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Relevansi dari Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang Terlebih Perempuan dan Anak-Anak dalam Upaya Menanggulangi Perdagangan Orang di Indonesia ..</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Pemberian restitusi .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Menjalin kerja sama dalam hubungan internasional  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Buku:.....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Kamus .....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>C. Perundang-Undangan.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>D. Konvensi.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>E. Internet.....</b>  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

